

**PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH  
TERLANTAR DI WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN DEMAK**

Tulisan hukum ini mengkaji tentang Pelaksanaan Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. Di mana dalam tulisan ini terdapat permasalahan yang akan dikaji antara lain kriteria tanah terlantar, pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, kendala-kendala dan solusi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dalam melaksanakan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar di Demak, serta akibat hukum terhadap obyek setelah penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.

Dalam tulisan ini jenis penelitian yang digunakan Peneliti adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptif analis, jenis pendekatannya menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan, sumber bahan hukum yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, kemudian dalam teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, sedangkan untuk teknik analisis hukumnya penulis menggunakan deskriptif dan kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan bahwa kriteria tanah terlantar harus ada subyek hukum dan obyek (hak atas tanah), harus ada jangka waktu dan perbuatan menelantarkan tanahnya, kemudian untuk pelaksanaan penertibanya dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Demak melakukan inventarisasi, identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar, peringatan , dan penetapan, kemudian tanah-tanah bekas tanah terlantar tersebut didayagunakan untuk kepentingan masyarakat melalui reform agraria, program strategis negara dan cadangan negara. Selanjutnya kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dalam melaksanakan Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di demak yaitu sulitnya pemegang hak untuk dihubungi, terbatasnya Sumber Daya Manusia dan anggaran untuk melakukan penertiban, belum adanya peraturan mengenai mekanisme Pendayagunaan tanah terlantar, sedangkan solusinya meliputi pentingnya mananamkan pemanfaatan tanah, adanya laporan dari masyarakat berkaitan dengan adanya tanah terlantar dan melakukan identifikasi mengenai adanya tanah yang diterlantarkan serta memberikan peringatan kepada pemegang hak atau pemilik hak bahwa dalam jangka waktu yang sudah ditentukan harus sudah menggunakan tanahnya sesuai peruntukannya. Sedangkan Akibat hukum terhadap obyek (hak atas tanah) setelah penertiban mengakibatkan tanahnya menjadi tanah negara.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Penertiban, Pendayagunaan, Tanah Terlantar

**ABSTRACT**

## CURBING AND UTILIZATION OF LAND DISPLACED WORK AREA DISTRICT OFFICE THE DEMAK

It examines the legal literature on the Implementation of Control and Utilization of Land Stranded Work Area Demak District Land Office. Where in this paper there are problems that will be studied include criteria wastelands, the implementation of the control and utilization of abandoned land conducted by the District Land Office Demak, constraints and solutions of the District Land Office Demak in implementing the control and utilization of unutilized land in Demak, as well as the legal consequences of the object after demolition and utilization of wastelands.

In this paper the type of research that is used Researcher is empirical juridical, specification research that is descriptive analyst, kind pendekatanya approach the concept and approach to legislation, sources of legal materials used are primary data and secondary data, then the data collection techniques the author uses literary study and field studies, while for legal analysis techniques the author uses descriptive and qualitative.

This study resulted in that the criteria wastelands there should be legal subjects and objects (land rights), there must be a period of time and practice to abandon his land, then for the implementation of penertibanya in this case the District Land Office Demak conduct an inventory, identify and research land indicated abandoned, warning and determination, then the lands of the former wastelands are utilized for the benefit of society through the agrarian reform program and the country's strategic reserves of the country. Further constraints faced by the District Land Office Demak in implementing Curbng And Utilization of Land Abandoned in Demak is the difficulty the holder the right to be informed, limited human resources and budget to perform an audit, the lack of regulations on the mechanisms Utilization of abandoned land, whereas the solution covering the importance of instilling utilization soil, the report from the public related to the wastelands and do the identification of the existence of abandoned land and provide a warning to the rights holder or owner of the rights that within a specified time should already using the land in accordance peruntukanya. While the legal consequences of the object (land rights) after demolition resulted in the land into state land

Keywords: Implementation, Control, Utilization, Wastelands